

# **PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA OPD KOTA PEKANBARU)**

**Puspita Ayunda Sari<sup>1)</sup>, Melida Wiguna<sup>2)</sup>, Ulfa Afifah<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email ayundapuspita0103@gmail.com

*THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH ACCOUNTING RULES ON THE TENDENCY OF ACCOUNTING FRAUD*

*(AN EMPIRICAL STUDY ON LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN PEKANBARU CITY)*

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the effectiveness of internal control and compliance with accounting rules on the tendency of accounting fraud in Regional Apparatus Organizations (OPD) in Pekanbaru City. This research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 90 respondents from 30 OPDs. The data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with the SmartPLS 3.0 software. The results show that the effectiveness of internal control has a significant negative effect on the tendency of accounting fraud. However, compliance with accounting rules does not have a significant effect. These findings indicate that strengthening internal control systems is crucial in minimizing fraudulent practices within local government institutions.*

*Keywords: Internal Control, Compliance with Accounting Rules, Accounting Fraud, OPD, SEM-PLS.*

## **PENDAHULUAN**

Kecurangan akuntansi merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat merusak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik dalam organisasi sektor publik maupun swasta. Dalam konteks pemerintahan daerah, kecurangan akuntansi bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal serta rendahnya kepatuhan terhadap aturan akuntansi yang berlaku. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena keuangan publik dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Ketika informasi keuangan yang seharusnya digunakan untuk pengambilan keputusan yang akurat

menjadi bias akibat manipulasi atau penyajian yang tidak jujur, maka yang terjadi adalah ketimpangan antara perencanaan dan realisasi anggaran serta meningkatnya potensi korupsi di sektor publik. Kondisi di atas dapat diamati melalui berbagai kasus yang terjadi di daerah, termasuk di Kota Pekanbaru. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan rekayasa laporan piutang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru dengan tujuan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Selain itu, muncul pula laporan mengenai manipulasi nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan melalui

mark-up nilai pajak kepada perusahaan-perusahaan, serta dugaan pemotongan insentif upah pegawai yang tidak sesuai prosedur. Praktik-praktik semacam ini merupakan bentuk dari kecurangan akuntansi yang tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan.

Menurut Standar Audit Seksi 316 PSA No. 70 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kecurangan akuntansi didefinisikan sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, baik berupa manipulasi, pemalsuan, atau penghilangan informasi secara sengaja untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Kecurangan ini seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan sistemik dan dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan internal atau ketidaktaatan terhadap standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat (Association of Certified Fraud Examiners/ACFE) mengelompokkan kecurangan akuntansi ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statements), (2) penyalahgunaan aset (asset misappropriation), dan (3) korupsi (corruption). Ketiga bentuk kecurangan ini sering kali saling berkaitan dan sulit dideteksi karena melibatkan kolusi, rasionalisasi, serta lemahnya sistem kontrol organisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritik dan praktis dalam memahami akar penyebab serta cara pencegahan kecurangan ini, salah satunya melalui penguatan pengendalian internal dan peningkatan ketaatan terhadap aturan akuntansi.

Teori Fraud Pentagon, yang dikembangkan oleh Crowe Howarth (2011), menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dibanding teori

pendahulunya (Fraud Triangle dan Fraud Diamond). Dalam Fraud Pentagon, terdapat lima faktor yang memicu seseorang melakukan kecurangan, yaitu: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (competence), dan arogansi (arrogance). Teori ini menekankan bahwa kecurangan tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan ekonomi atau lemahnya kontrol, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter individu dan lingkungan organisasi yang permisif.

Efektivitas pengendalian internal merupakan salah satu faktor krusial dalam mencegah terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang baik tidak hanya melibatkan prosedur dan kebijakan tertulis, tetapi juga implementasi yang konsisten serta pengawasan yang ketat terhadap semua aktivitas keuangan. Dalam konteks OPD, pengendalian internal diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar, dilengkapi dengan bukti pendukung yang valid, serta melalui mekanisme persetujuan yang berjenjang.

Di sisi lain, ketaatan terhadap aturan akuntansi juga memainkan peranan penting. Aturan akuntansi, khususnya yang termaktub dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, dirancang untuk menjaga konsistensi, objektivitas, dan keterbandingan laporan keuangan sektor publik. Ketika aparat pemerintah tidak mematuhi aturan ini—baik karena kurangnya pemahaman, pengabaian, atau adanya niat untuk menyembunyikan informasi—maka laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak andal dan membuka celah bagi tindakan fraud.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua OPD memiliki pengendalian internal yang efektif ataupun kepatuhan tinggi terhadap aturan akuntansi. Terdapat perbedaan signifikan antar instansi dalam hal penerapan kedua aspek tersebut. Hal ini

mendorong pentingnya dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, sekaligus sebagai referensi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik.

## **Tinjauan Teori**

### **2.1 Teori Fraud Pentagon**

Teori Fraud Pentagon merupakan pengembangan dari teori Fraud Triangle dan Fraud Diamond yang digunakan untuk menjelaskan mengapa individu melakukan kecurangan akuntansi. Diperkenalkan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011, teori ini menambahkan dua elemen baru—kemampuan (*capability*) dan arogansi (*arrogance*)—terhadap tiga elemen utama sebelumnya yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Kelima elemen ini dianggap sebagai faktor utama pendorong terjadinya fraud di sektor publik maupun privat.

- Tekanan merujuk pada dorongan internal maupun eksternal, seperti kebutuhan keuangan, target kinerja, atau tuntutan politik.

- Kesempatan adalah peluang yang muncul akibat lemahnya pengendalian internal, ketidakterbukaan sistem, serta kurangnya pengawasan dan audit.

- Rasionalisasi adalah justifikasi atau pembenaran pelaku bahwa tindakannya tidak sepenuhnya salah.

- Kemampuan mencerminkan akses dan keahlian pelaku untuk mengeksploitasi celah sistem.

- Arogansi menggambarkan keyakinan bahwa pelaku memiliki otoritas atau kekuasaan yang membuatnya merasa kebal dari hukuman atau pengawasan

Teori ini penting karena menjelaskan bahwa tindakan kecurangan tidak hanya dipicu oleh kondisi eksternal semata, tetapi juga oleh faktor karakter dan etika individu. Dengan kata lain, sistem pengendalian internal dan aturan akuntansi saja tidak cukup bila tidak didukung oleh budaya organisasi dan nilai-nilai integritas.

### **2.2 Pengendalian Internal**

#### **a. Definisi dan Tujuan**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, pelaporan yang andal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan utama dari pengendalian internal menurut Arens (2018) meliputi:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan
2. Efisiensi dan efektivitas operasi
3. Kepatuhan pada hukum dan peraturan

#### **b. Komponen Pengendalian Internal menurut COSO**

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mengidentifikasi lima komponen utama pengendalian internal:

1. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap etis dan integritas manajemen.
2. Penilaian risiko – identifikasi dan analisis risiko dalam pencapaian tujuan.

3. Aktivitas pengendalian seperti pemisahan tugas, otorisasi, dokumentasi.

4. Informasi dan komunikasi sistem pelaporan yang efektif dan efisien.

5. Pemantauan – evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian

#### c. Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Wilopo (2016), meskipun pengendalian internal bermanfaat, tetap memiliki batasan. Keterbatasan ini antara lain:

- Human error (kesalahan manusiawi)
- Kolusi di antara pegawai
- Manajemen override (manajemen mengesampingkan kontrol)
- Pertimbangan biaya-manfaat yang sulit diukur secara tepat

#### 2.3 Ketaatan Aturan Akuntansi

##### a. Definisi

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kepatuhan terhadap pedoman dan standar akuntansi yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, acuan utamanya adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010

Rahmawati & Soetikno (2012) menyatakan bahwa ketaatan ini mencerminkan kepatuhan dalam melaksanakan setiap prosedur keuangan, termasuk pencatatan transaksi, pelaporan aset, hingga penilaian terhadap kewajiban dan pendapatan.

##### b. Prinsip-prinsip SAP

SAP berpedoman pada prinsip-prinsip:

- Relevansi dan keandalan informasi
- Konsistensi penyajian antar periode
- Keterbandingan antar instansi
- Objektivitas dan kehati-hatian dalam pengukuran

##### c. Peran Ketaatan terhadap Kecurangan

Ketidaktaatan terhadap SAP menciptakan peluang untuk memanipulasi laporan keuangan. Berdasarkan Fraud Pentagon, ketidaktaatan ini berkaitan dengan elemen “opportunity” dan “competence”. Dengan kompetensi tinggi dan tanpa pengawasan, pelaku dapat menyembunyikan fraud melalui rekayasa pelaporan yang sulit dideteksi. Adelin dan Fauzihandani (2018), serta Thoyyibatun (2022) menunjukkan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud—artinya semakin tinggi kepatuhan, semakin kecil kemungkinan terjadinya fraud.

#### 2.4 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

##### a. Definisi

Menurut Yani (2019), kecenderungan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara tidak jujur seperti manipulasi data, pemalsuan laporan, hingga penyalahgunaan aset. Tujuan utamanya adalah mendapatkan manfaat pribadi yang merugikan pihak lain. ACFE (2016) menyatakan bahwa fraud merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik dari dalam organisasi maupun dari luar, dengan cara menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan.

##### b. Jenis-Jenis Kecurangan

Simanjuntak (2018) dan ACFE mengategorikan kecurangan menjadi:

1. Kecurangan Laporan Keuangan rekayasa data keuangan (over/understatement).
2. Penyalahgunaan Aset penggelapan, duplikasi pembayaran, dan pencurian.
3. Korupsi suap, gratifikasi ilegal, dan konflik kepentingan

Kecurangan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi (berulang dan tidak

berulang), konspirasi (bona fide dan pseudo), dan keunikan (fraud khusus dan umum).

## 2.5 Pencegahan Kecurangan

Beberapa langkah preventif yang direkomendasikan dalam dokumen skripsi antara lain:

- Mengurangi tekanan situasional melalui kesejahteraan dan etika kerja.
- Meningkatkan pengendalian internal, pemisahan fungsi, dan sistem audit.
- Menanamkan nilai integritas dan kejujuran melalui teladan dari pimpinan.
- Menyusun kebijakan organisasi yang tegas, disertai sanksi yang konsisten

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Kota Pekanbaru, sebanyak 30 instansi. Teknik pengambilan sampel adalah sensus, dengan mengambil 3 responden dari tiap OPD: Kepala Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran. Total responden adalah 90 orang.

### Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

**Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

No.	Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
-----	----------	----------	----------------------

1.	Kecurangan Akuntansi	Penyajian salah secara sengaja dalam laporan keuangan	13
2.	Pengendalian Internal	Proses untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif	15
3.	Ketaatan Aturan Akuntansi	Kepatuhan terhadap peraturan akuntansi pemerintah	

Sumber: Data Olahan, 2025

### Metode analisis data

Pengolahan data dilakukan dengan SEM-PLS (Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Square) menggunakan SmartPLS 3.0. Langkah analisis terdiri dari:

- Evaluasi outer model: validitas dan reliabilitas
- Evaluasi inner model:  $R^2$ , uji hipotesis (path coefficient)

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk

mendapatkan data primer. Kuesioner adalah daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan pada responden. Kuesioner diberikan kepada yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternative yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner akan langsung diantarkan ke OPD yang ada di Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi rendahnya respon responden dalam mengisi kuesioner. Setelah itu, kuesioner akan dikumpulkan kembali dengan menjemputnya secara langsung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Jumlah sampel yang diteliti setelah penyesuaian**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah OPD yang menjadi populasi di Kota Pekanbaru	30
2.	Jumlah responden per OPD	3
3.	Total sampel: 30 OPD x 3 responden	90
4.	Data tidak lengkap dan tidak valid (dihapus)	(0)
5.	Total Jumlah	90

	Sampel	
--	--------	--

## Analisis Statistik Deskriptif Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden

Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin (Laki-laki)	51	56.7%
Jenis Kelamin (Perempuan)	39	43.3%
Usia 21–30 tahun	25	27.8%
Usia 31–40 tahun	38	42.2%
Usia >40 tahun	27	30.0%
Pendidikan D3	27	30.0%
Pendidikan S1	59	65.5%
Pendidikan S2	4	4.5%

Sumber: Data Olahan, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel masih berada pada kategori perusahaan kecil hingga menengah berdasarkan ukuran total aset yang telah dinormalisasi, dan ukuran perusahaan ini berpotensi memengaruhi lamanya proses audit akibat perbedaan tingkat kompleksitas dan sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan.

## Hasil Validitas Konvergen Tabel 3 hasil Konvergen

Indikator	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Efektivitas Pengendalian Internal	Ketaatan Aturan Akuntansi
Y1	0.851	-0.610	-0.533
Y2	0.860	-0.570	-0.515

Indikator	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Efektivitas Pengendalian Internal	Ketaatan Aturan Akuntansi
Y3	0.876	-0.568	-0.478
...	...	...	...
X1.3	-0.710	0.918	0.710
X2.1	-0.578	0.703	0.904
X2.2	-0.597	0.746	0.902

Nilai outer loading di atas 0.7 pada umumnya menunjukkan bahwa indikator memiliki kontribusi signifikan terhadap konstruk yang diukur. Hampir seluruh indikator memiliki nilai di atas 0.7, menandakan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

**Tabel 4. Discriminant Validity**

Konstruk	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Efektivitas Pengendalian Internal	Ketaatan Aturan Akuntansi
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	0.866	0.718	0.654
Efektivitas Pengendalian Internal	0.718	0.923	0.815
Ketaatan Aturan Akuntansi	0.654	0.815	0.870

Sumber: Data Olahan, 2025

Validitas diskriminan terpenuhi jika nilai pada diagonal (yang dicetak tebal) lebih besar daripada nilai korelasi antar

konstruk lainnya. Tabel ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki nilai akar AVE (nilai diagonal) yang lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Artinya, setiap konstruk benar-benar mengukur hal yang berbeda dari konstruk lainnya.

### Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

**Tabel 5 Hasil Konstruk**

Konstruk	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	0.974	0.975	0.977	0.750
Efektivitas Pengendalian Internal	0.956	0.959	0.966	0.852
Ketaatan Aturan Akuntansi	0.971	0.975	0.974	0.757

Sumber: Data Olahan, 2025

Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR) di atas 0.7 menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Sementara nilai AVE di atas 0.5 menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians dapat dijelaskan oleh indikator. Dengan demikian, seluruh konstruk yang digunakan telah **valid dan reliabel**.

### Hasil Uji Nilai R-Square

**Tabel 6 Uji Nilai**

Variabel Dependen	R-Square	R-Square Adjusted
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	0.513	0.502

Nilai R-Square sebesar 0.513 menunjukkan bahwa **51,3% variasi** dalam kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dijelaskan oleh

variabel efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi. Sisanya sebesar 48,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

### **Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nilai koefisien -0.497 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan efektivitas pengendalian internal akan menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 0.497 satuan.

Hal ini sejalan dengan teori Fraud Pentagon, di mana salah satu penyebab utama kecurangan adalah "opportunity" atau kesempatan. Pengendalian internal yang kuat mampu menutup peluang terjadinya kecurangan, melalui pemisahan tugas, pelaporan berlapis, pengawasan internal yang ketat, dan audit rutin. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rosliana (2016) dan Yulia et al. (2021) yang juga menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat menentukan rendahnya tingkat fraud.

Secara praktis, OPD yang memiliki sistem pengendalian internal yang terstandar dan dijalankan secara konsisten, memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menghadapi manipulasi keuangan, pencatatan ganda, atau penggelapan dana. Sistem ini tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga memerlukan pengawasan oleh manajemen puncak dan adanya budaya kerja yang menghargai transparansi.

### **5.5.2 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi**

Berbeda dari variabel sebelumnya, ketaatan terhadap aturan akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Nilai koefisien -0.256 dengan p-value 0.084 mengindikasikan bahwa meskipun arahnya

negatif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

Temuan ini menyiratkan bahwa sekadar patuh terhadap aturan formal akuntansi tidak cukup untuk menghilangkan fraud. Hal ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan:

- Kepatuhan bersifat simbolik atau administratif; banyak entitas mengikuti aturan hanya sebatas dokumentasi, namun substansi dan etika pelaporan diabaikan.
- Tidak adanya internalisasi nilai-nilai etis dan integritas, sehingga ketaatan hanya menjadi formalitas.
- Sanksi yang lemah atau tidak konsisten, membuat pegawai tidak merasa perlu menghindari pelanggaran.

Secara teoretis, hal ini menjadi kritik terhadap pendekatan rule-based dalam pengelolaan akuntansi sektor publik. Aturan yang kaku tanpa pengawasan ketat dan budaya organisasi yang kuat, tidak mampu menekan kecurangan secara signifikan.

### **5.6 Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis: Secara Teoretis:

- Penelitian ini memperkuat peran pengendalian internal sebagai variabel penting dalam model-model deteksi fraud.
- Mengonfirmasi bagian dari teori Fraud Pentagon yang menyatakan bahwa kesempatan (opportunity) adalah aspek utama yang harus dikontrol untuk menekan fraud.

Secara Praktis:

- Pemerintah daerah melalui inspektorat harus lebih fokus pada penguatan sistem pengendalian internal yang mencakup sistem pelaporan internal, evaluasi rutin, dan audit internal berkala.
- Ketaatan terhadap aturan akuntansi harus ditingkatkan melalui pelatihan yang bersifat substantif,

bukan hanya formal, serta diikuti dengan pengawasan berkala yang bersifat korektif.

### 5.7 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mendukung hasil dari:

- Mustika (2019), yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal signifikan terhadap fraud.
- Pranata (2019), yang menekankan pentingnya aspek sistem kontrol dan moralitas dalam menekan fraud di sektor publik.

Namun, hasil berbeda ditemukan pada variabel ketaatan terhadap aturan, yang dalam beberapa penelitian seperti oleh Riesma Firdausy (2022) ditemukan berpengaruh signifikan, namun dalam penelitian ini tidak. Hal ini menunjukkan pentingnya konteks organisasi dan budaya institusional sebagai variabel moderator yang mungkin perlu diuji dalam penelitian lanjutan.

### 5.8 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah:

- Hanya menggunakan dua variabel bebas; masih banyak faktor lain seperti gaya kepemimpinan, sistem pelaporan internal (whistleblowing), kompensasi, atau moralitas individu yang berpotensi memengaruhi fraud.
- Data bersifat cross-sectional, sehingga tidak dapat menangkap perubahan sikap responden dari waktu ke waktu.
- Data diambil dari satu wilayah administratif (Pekanbaru), sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati.

---

### 5.9 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk:

- Menambahkan variabel moderasi atau mediasi, seperti budaya organisasi atau integritas pegawai.

- Melakukan studi longitudinal untuk mengamati kecenderungan kecurangan dari waktu ke waktu.
- Memperluas cakupan wilayah agar generalisasi hasil menjadi lebih kuat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pekanbaru. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS), dengan menggunakan 90 responden dari 30 OPD. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  
Efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam organisasi, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Temuan ini menguatkan teori Fraud Pentagon yang menyatakan bahwa salah satu pendorong utama terjadinya fraud adalah adanya kesempatan (opportunity), yang dapat ditekan dengan sistem pengendalian yang baik.

Pengendalian internal yang efektif dapat terwujud melalui beberapa aspek seperti pemisahan tugas yang jelas, pengawasan berjenjang, sistem pelaporan internal yang aman, serta penegakan aturan dan disiplin terhadap pelanggaran. Ketika sistem tersebut dijalankan secara konsisten, maka celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kecurangan

akan tertutup. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rosliana (2016), Yulia et al. (2021), dan Eliza (2019) yang juga menemukan hubungan signifikan antara pengendalian internal dan kecurangan.

## 2. Ketaatan Aturan Akuntansi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Meskipun arah hubungan antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi adalah negatif, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan atau standar akuntansi seperti SAP belum tentu menurunkan potensi fraud secara nyata jika tidak dibarengi dengan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etis dan integritas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan di beberapa OPD mungkin bersifat formalitas atau administratif semata. Pegawai mungkin sekadar menjalankan ketentuan tanpa memahami substansi dan tujuan dari aturan tersebut. Tanpa internalisasi nilai akuntabilitas dan etika profesi, ketaatan aturan tidak berdampak pada penurunan fraud. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Firdausy (2022), yang menemukan bahwa aturan akuntansi saja tidak cukup untuk mencegah kecurangan bila tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan etika organisasi.

## 3. Model Penelitian Mampu Menjelaskan Sebagian Besar Variabel Tergantung

Hasil pengujian nilai R-square sebesar 0.513 menunjukkan bahwa kedua variabel independen dalam model ini, yaitu efektivitas pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan akuntansi, mampu menjelaskan 51,3% variasi yang terjadi pada variabel kecenderungan kecurangan akuntansi. Ini berarti bahwa model yang dibangun memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik. Namun, 48,7% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model, seperti budaya

organisasi, tekanan kerja, integritas pribadi, dan sebagainya.

## Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas,

maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pimpinan OPD

Pemerintah daerah sebaiknya secara aktif memperkuat sistem pengendalian internal di setiap unit kerja. Penguatan ini tidak hanya terbatas pada penyusunan SOP atau pembentukan unit pengawasan, tetapi juga meliputi peningkatan kompetensi SDM, penggunaan teknologi informasi untuk audit dan kontrol, serta penegakan disiplin secara konsisten. Inspektorat Daerah juga perlu memperkuat fungsi audit internal dan memfasilitasi pelatihan berkelanjutan mengenai pengendalian risiko dan anti-fraud strategy.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun budaya kerja yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas melalui keteladanan pimpinan dan pemberian reward serta punishment yang jelas dan adil.

### 2. Bagi Pegawai Keuangan dan Pengelola Akuntansi di OPD

Pegawai keuangan dan akuntansi di lingkungan OPD harus meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap standar akuntansi pemerintahan bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai instrumen integritas. Mereka harus memahami bahwa pelaporan keuangan yang akurat dan bebas manipulasi bukan hanya sebatas aturan, tetapi merupakan kewajiban moral dan profesional.

Disarankan pula agar pegawai keuangan mengikuti pelatihan etika profesi, pelaporan keuangan berbasis risiko, dan sistem deteksi fraud secara berkala, sehingga mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sebelum terjadi.

### 3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menguji dua variabel independen. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tekanan anggaran, sistem penghargaan, budaya organisasi, integritas individu, dan peran kepemimpinan dalam mencegah kecurangan. Variabel moderasi dan mediasi juga dapat dieksplorasi, seperti pengaruh etika individu sebagai mediasi antara kepatuhan dan kecenderungan fraud.

Selain itu, pendekatan mixed-method (kuantitatif dan kualitatif) dapat digunakan untuk menangkap nuansa yang lebih mendalam dari praktik fraud di sektor publik, misalnya dengan studi kasus atau wawancara mendalam terhadap auditor internal atau pihak inspektorat.

4. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan Regulator seperti Kementerian Dalam Negeri atau BPKP diharapkan terus mengembangkan kebijakan pengawasan keuangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis risiko dan integritas. Diperlukan regulasi yang mewajibkan pembentukan unit pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di setiap OPD, serta memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Pembuatan indeks kepatuhan dan skor integritas secara berkala juga dapat menjadi salah satu alat evaluasi dan perbandingan antar OPD, agar setiap instansi termotivasi untuk memperbaiki sistemnya secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adelin, V. (2013). Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).

Afsari, S. F. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan berdasarkan teori fraud triangle: Persepsi pegawai pemerintahan (Studi pada SKPD di Kabupaten Jember)* (Skripsi). Universitas Jember.

Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh fraud pentagon dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44–62.

Ariadi, J., Yamin, A., & Cahyono, T. D. (2024). Pengaruh penerapan e-procurement, budaya organisasi dan etika pegawai sebagai upaya pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa (Studi kasus di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 7(11), 12846–12857.

Bestari, D. S., Azlina, N., & Julita, J. (2016). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.

Crowe Horwath. (2012). *Fraud pentagon theory*. Crowe LLP.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least square: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mondy, R. W., & Martocchio, J. J. (2016). *Human resource management* (14th ed.). Pearson Education Limited.

- Novikasari, Y. (2017). Pengaruh moralitas individu, sistem pengendalian internal pemerintah dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *JOM Fekon, Universitas Riau*.
- Novitasari, A. R., & Chariri, A. (2018). Analysis of factors affecting fraud financial statements in the perspective of fraud pentagon. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(1), 1–15.
- Nurlaeliyah, S., & Anisykurlillah, I. (2017). Analysis of factors affecting the tendency of accounting fraud with an ethical behavior as intervening variable. *Accounting Analysis Journal*, 6(2), 299–312.
- Paranoan, N., Tandungan, E. S., & Sipi, A. D. S. (2018). Efektivitas pengendalian internal, kepuasan kerja, dan kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akun Nabelo*, 1(1), 1–13.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Piotama, J. E. (2019). *Pengaruh moralitas individu, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada OPD Provinsi Riau)* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau.
- Pranata, E. E. (2016). *Pengaruh moralitas aparat, pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada Pemerintah Kota Pekanbaru)* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The effect of individual morality and internal control on the propensity to commit fraud: Evidence from local governments. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), 208–219.
- Rahadi, F. P., & Sasmita, S. (2021). Pengaruh pengendalian internal bisnis online terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), 97–105.
- Rahmawati, A. P., & Soetikno, I. (2012). Analisis pengaruh faktor internal dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Rismayanti, L. P. A., & Putra, C. G. B. (2023). Pengaruh kesesuaian kompensasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Denpasar Barat). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 13(2).
- Roslina. (2016). Pengaruh efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Sumigita Jaya di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(9), 1689–1699.
- Sekaran, U. (2017). *Research methods for business* (6th ed.). Yogyakarta: BPF.
- Shintadevi, P. F. (2019). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. *Nominal: Barometer Riset*

- Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 111–126.
- Subayak, J. S. (2016). Pengaruh keadilan organisasi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kecurangan fraud. *JOM Fekon, Universitas Riau*.
- Sugiyono. (2016). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Thoyibatun, S. (2022). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16(2).
- Tuannakotta, T. M. (2016). *Akuntansi forensik dan audit investigasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.